BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1993 kekhawatiran negara Indonesia terhadap penurunan minyak makin terasa kuat. Ketidakpastian harga di pasar, minyak dunia saat ini lebih besar dibandingkan dengan masa lalu, hal ini terulang kembali di tahun 2008. Salah satu faktor utama menyangkut negara Kuwait dan Irak menjadi eksportir. Jika negara tersebut dapat kembali ke tingkat produksi sebelum perang teluk terjadi maka produksi OPEC akan dapat mencapai angka di atas 29 juta barel sehari. Bila hal ini terjadi, harga yang melemah akhir-akhir ini akan dapat terus menukik turun. Jadi satu hal yang menjadi ciri dari kondisi ekonomi lemah adalah kelemahan yang disebabkan oleh upaya sengaja dari pemerintah dalam rangka membuat mesin ekonomi dingin. Keadaan ini berbeda dengan kelemahan ekonomi yang pernah terjadi, dimana faktor eksternal (resesi ekonomi dunia dan penurunan harga migas) menjadi sumber penyebabnya. Mesin ekonomi disini maksudnya tingkat bunga yang sudah terlanjur tinggi sulit untuk diturunkan yaitu kenaikan permintaan agregat masih tetap ada. Dua ciri yang mewarnai kesulitan permintaan tingkat bunga saat itu, pertama devaluasi tetap berlangsung, kedua naiknya tingkat premium.[1]

---

[1] Mohammad Arsjad Anwar, dkk., *Sumber Daya Teknologi dan Pembangunan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 6-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberi batasan pada ilmu politik tidak semudah yang kita duga. Jika sosiologi itu terutama memperhatikan tingkah laku manusia dalam konteks masyarakat dan dalam hal ini mencakup segala-galanya, maka jelaslah politik itu hanya memperhatikan beberapa aspek saja dari masyarakat.

Tidak terlalu sulit untuk mengenal aspek-aspek masyarakat yang menjadi pusat perhatian studi politik, knususnya lembaga-lembaga sosial seperti badan legislatif dan eksekutif, partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan, dan beberapa bidang khusus dari mental serta tingkah laku manusia, seperti proses pemilihan atau legislatif.

Perhatian sentral dari politik adalah penyelesaian dari konflik-konflik manusia; atau proses dengan mana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu; atau secara otoritatif mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu; atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.[2]

Dalam suatu sistem komunikasi politik, sumber tipikal mungkin adalah seorang calon untuk pemilihan bagi suatu jabatan politik; pesannya akan merupakan serangkaian usul politik; salurannya berupa siaran televisi; pendengarannya adalah anggota kelompok pemilih yang kebetulan memperhatikan siaran; dan umpan baliknya adalah persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap usul-usulnya.[3] Setelah pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 kemudian akan dilaksanakan pemilu pilihan presiden tahun 2009. Menjelang pemilu tahun 2009 calon

---

[2] Michael Rush & Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 2-3.
[3] *Ibid.*, hal. 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden dan cawapres sibuk melakukan kampanye dan kegiatan lainnya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin mencalonkan kembali menjadi presiden RI melalui cara penayangan iklan di TV bahwa Partai Demokrat mencalonkan Presiden SBY, beliau telah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali. Dengan tayangan iklan tersebut tujuannya adalah untuk mencari simpati rakyat supaya dipilih kembali menjadi presiden. Maka dengan adanya tayangan iklan tersebut mempengaruhi rakyat supaya memilih SBY. Namun ada juga rakyat yang setuju memilih SBY dan ada juga yang tidak memilihnya.

Adapun dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 menerangkan tentang ketaatan umat manusia kepada Allah, Rasul serta pemimpinnya (*ulil amri*) yang berbunyi sebagai berikut :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء : ٥٩)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS. An-Nisa' : 59)[4]

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Transliterasi Arab-Latin Model Kanan Kiri* (Semarang : CV. Asyifa', 2001), hal. 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang dalam haditsnya sebagai berikut :

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُ بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ اِلاَّ أُمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدُهُمْ.

Artinya : *"tidak halal bagi tiga orang (atau lebih) yang berada di suatu tempat di atas bumi ini yang tidak menjadikan satu dari mereka sebagai pemimpin"*[5]

Dalam hadits di atas, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi mewajibkan adanya pimpinan dalam suatu kelompok kecil dalam perjalanan ini pada hakekatnya adalah mengingatkan pada semua perkumpulan.

Adapun dasar-dasar hadits lainnya sebagai berikut :

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ أَوْكَرِهِ مَالَمْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلاَسَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (رواه البخارى)

Artinya : *"Mendengarkan dan taat adalah wajib bagi seorang muslim mengenai yang ia sukai ataupun yang tidak, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Akan tetapi apabila diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat"*. (HR. Al-Bukhori)[6]

Masalah ketaatan kepada pemimpin adalah merupakan salah satu aspek utama dari stabilitas dan ketentraman dan masalah ini menjadi sangat penting manakala tujuan pembentukan atau berdirinya negara itu sendiri, yakni demi terlaksananya hukum-hukum Tuhan yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Karena itulah para ulama sepakat menetapkan kewajiban

---

[5] Drs. Muhibbin, MA., *Hadis-Hadis Politik* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 28.
[6] *Ibid.*, hal. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat atau umat untuk mematuhi pemimpinnya, selama pemimpin tersebut tidak keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam pemilu calon legislatif 2009 apabila dikaitkan dengan hadis dan al-Qur'an di atas dapat dijelaskan yaitu dalam sebuah negara diwajibkan dan diperlukan adanya pimpinan yang memimpin rakyatnya. Apabila caleg tersebut sudah terpilih oleh rakyat menjadi pemimpin hendaknya tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada rakyat. Rakyat diwajibkan mentaati pemimpinnya selama tidak diperintah berbuat maksiat dengan menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Jika pemimpin kita menyuruh berbuat maksiat maka kita tidak diwajibkan untuk mentaatinya.

Rakyat memilih calon legislatif tidak hanya asal memilih saja mereka melihat karakter caleg tersebut sesuai atau tidak dalam menjadi pemimpin nantinya. Pastilah rakyat memilih pemimpin yang adil, jujur, bijaksana dan bersih dari korupsi. Rakyat berharap calon pemimpin yang dipilih dapat memberi kemajuan dalam berbagai hal bagi bangsanya.

Calon legislatif hendaknya tidak menggunakan alat politik apapun dalam pemilu legislatif yang tujuannya hanya ingin dipilih oleh rakyat, tetapi hal itu sebaiknya dilakukan secara murni, caleg yang terpilih hendaknya dibuktikan kepemimpinannya dan tidak hanya mengumbar janji saja.

Pemimpin adalah pemegang kekuasaan dalam negara. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan syariat-Nya serta membimbing kepada kemaslahatan dan kebaikan, mengurus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan dengan jujur dan adil serta memimpinnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Namun demikian pemimpin bukanlah makhluk suci dan kebal. Ia juga sebagai warga negara yang dipercaya mengurus agama dan dunia sekaligus, sehingga tanggung jawab dan bebannya lebih berat. Dengan demikian ia tidak dapat berkehendak dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, sumber kekuasaan adalah di tangan rakyat itu sendiri dan bukan pemimpin. Jika pemimpin berbuat salah umat mempunyai hak untuk menasehati, meluruskan dan mengkoreksi, bahkan mempunyai hak untuk memecat jika terdapat alasan yang sah untuk bertindak demikian.

Status kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan Islam adalah sama dengan kepala pemerintahan suatu negara yang berundang-undang dasar. Ini disebabkan kekuasaan khalifah (pemimpin) bersumber pada umat yang diwakili oleh lembaga *ahl al-Hall wa al-aqd.*[7]

Keputusan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai era harga BBM untuk masyarakat yang didasarkan pada harga pasar. Kebijakan tersebut terlihat bagus dan berpihak kepada masyarakat luas. Penurunan harga BBM akan menjadi solusi bagi masyarakat dan industri karena menurunkan biaya produksi dan menaikkan daya beli.

Klaim bahwa pemerintahan SBY-Kalla merupakan satu-satunya rezim yang pernah menurunkan harga BBM seolah prestasi luar biasa. Padahal, keputusan tersebut justru akan memicu masalah baru dalam pemenuhan

---

[7] *Ibid.*, hal. 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

energi bagi masyarakat. Artinya kebijakan tersebut sebenarnya menjadi bukti bahwa pemerintah ingin segera lepas tangan dari kewajiban memenuhi kebutuhan dasar energi.[8]

Kebijakan penurunan harga BBM sejatinya awal dari dihapusnya BBM bersubsidi bagi rakyat. Ditegaskan oleh pemerintah SBY-Kalla bahwa sejak saat ini harga BBM untuk masyarakat luas akan ditentukan sesuai tinggi rendahnya harga minyak mentah internasional dan naik turunnya harga dolar.

Kebijakan ini merupakan kemenangan Menteri ESDM yang sejak awal getol ingin segera membawa harga BBM pada harga pasar. Tujuannya agar agenda liberalisasi sektor migas segera tuntas. Ini juga menjadi kemenangan Menteri Keuangan yang telah lama ingin "mendisiplinkan APBN" dari anggaran-anggaran yang memberatkan pemerintah.

Untuk menjawab keraguan masyarakat tentang stabilitas harga dan pasok BBM, pemerintah menyatakan bahwa harga BBM akan diatur dengan penetapan harga batas atas, untuk premium Rp. 6.000 perliter dan untuk solar Rp. 5.500 perliter.

Sepintas strategi ini sudah tepat. Namun, strategi ini tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan BBM bagi masyarakat. Dengan kebijakan harga BBM yang lama saja banyak masyarakat yang tidak memperoleh BBM sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Bila harga BBM akan dikoreksi setiap bulan atau dua minggu sekali, masyarakat akan menghadapi ketidakpastian yang semakin besar.

---

[8] Hendri Saparini, "Selamat Jalan, Subsidi BBM", *Jawa Pos* (22 Desember, 2008), h. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga pasar maupun harga batas atas tidak ditetapkan berdasar harga pokok produksi yang transparan. Hingga saat ini pemerintah SBY-Kalla tidak bisa menjelaskan harga pokok BBM yang sebenarnya.

Penghitungan yang sebenarnya sangat sulit dibuka karena memang terjadi banyak kebocoran dan inefisiensi dalam pengelolaan migas. Adalah tidak adil bila harga pasar untuk rakyat ditentukan berdasar harga pokok dalam kondisi pengelolaan migas yang amburadul.

Sebelum menentukan harga BBM untuk rakyat, seharusnya langkah-langkah pembenahan pengelolaan migas, baik tata niaga, peraturan yang adil dalam *cost recovery*, dan sebagainya dilakukan karena akan menekan harga pokok.

Sebagaimana diketahui, pasal 28 ayat 2 UU Migas menyebutkan harga bahan bakar minyak dan gas bumi ditentukan sesuai harga pasar telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena harga komoditas yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Pasal tersebut akhirnya diganti dengan harga bahan bakar minyak dan gas bumi ditetapkan oleh pemerintah.

Jelas bahwa keputusan pemerintah SBY-Kalla untuk segera membawa harga BBM mengikuti harga pasar merupakan bagian dari agenda percepatan liberalisasi migas dan penghapusan subsidi. Bila dalam menghadapi krisis semua negara memprioritaskan kepentingan nasional.[9]

---

[9] Hendri Saparini, "Selamat Jalan, Subsidi BBM", *Jawa Pos*, h. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peluang harga BBM kembali turun kian terbuka lebar. Sebab, harga minyak mentah dunia terus menuju titik terendah baru. Jurus Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas produksi 2,2 juta barel perhari terbukti tak cukup ampuh untuk mengatrol harga emas hitam itu.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy menilai, harga premium saat ini memang bisa turun lebih besar. Sebab, harga Rp. 5.000 per liter masih jauh dari harga pasar. "Seharusnya, harga premium bisa Rp. 2.500 per liter jika pemerintah tidak mencari untung", kata Ichsan dalam diskusi bertajuk *Harga BBM Turun antara Politis dan Realitas* di Jakarta. Dia khawatir, selisih harga yang cukup besar bisa menjadi peluang Pertamina untuk membiayai kepentingan politik menjelang 2009.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan menyatakan, penurunan harga BBM sangat efektif mendongkrak kinerja perekonomian. Menurut dia, penurunan harga solar dan premium mampu menurunkan harga pangan dan bahan pokok hingga lima persen.[10]

Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu Dradjad Wibowo mengkritik dari besaran penurunannya, harga BBM dan TDM seharusnya bisa turun ke posisi sebelum kenaikan harga, Maret 2005. Kenyataannya, penurunan harga BBM justru dicicil sampai tiga kali, dengan total penurunan untuk premium Rp. 1.500 sejak 1 Desember lalu. Padahal, harga minyak dunia sekarang berada pada posisi paling rendah dalam empat

[10] Jawa Pos, *Minyak Tembus Terendah* (21 Desember, 2008), h. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun terakhir. Sebagai perbandingan, harga premium waktu kenaikan awal Maret 2005 naik sampai 90 persen, dari Rp. 2.400 per liter menjadi Rp. 4.500/liter. Solar naik 104,7 persen, dari Rp. 2.100/liter menjadi Rp. 4.300/liter. Minyak tanah juga naik, dari Rp. 700/liter menjadi Rp. 2.000/liter. Kenaikan itu disusul lagi dengan kenaikan kedua pada awal Oktober 2005 dengan persentase yang hampir sama. Saat harga BBM naik lagi pada Mei 2008, kenaikan rata-rata sebesar 28,7 persen. Minyak tanah naik menjadi Rp. 2.500/liter. Premium naik dari Rp. 4.500/liter menjadi Rp. 6.000/liter dan solar dari Rp. 4.300/liter menjadi Rp. 5.500 per liter. Soal kebijakan terhadap pasar tradisional dan produksi dalam negeri, Dradjad mengatakan, selama ini pemerintah kurang melindungi pasar tradisional. Sebaliknya, pemerintah justru berpihak terhadap peritel asing. Namun, wacana produksi dalam negeri pun sekarang ikut-ikutan disuarakan.

Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Sampai saat ini mungkin kendalanya adalah ukuran kertas yang sangat besar sehingga menyulitkan peserta mencari caleg pilihan dan ini akan memakan waktu yang lama. Dengan demikian, diharapkan pada waktu mencontreng akan sangat lama. Masalah logistik pemilu legislatif meninggalkan catatan panjang, baik proses pengadaan dan terutama pendistribusiannya. Misalnya, sejumlah daerah melaporkan kelambanan pengiriman surat suara, juga mengeluhkan surat suara yang rusak. Bahkan sehari sebelum hari-H pemungutan suara saja, sudah dipastikan 246 TPS di 5 kabupaten di Provinsi Papua tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan pemungutan suara pada 9 April. Janji KPU untuk mendahulukan wilayah sulit ternyata kurang terbukti. Kampanye pemilu legislatif juga meninggalkan catatan tersendiri. Penanganan kasus pelanggaran kampanye terkesan terjebak dalam pelanggaran klasik, semisal lewat waktu, kampanye di luar jadwal, dan juga pelibatan anak-anak dalam kampanye.

Majalah *The Economist* (edisi 4 April 2009) menurunkan tajuk "*The Indonesian Surprise*", mengulas fenomena demokrasi politik, pemilu 2009 di Indonesia. Dicatat, pemilu ketiga di Indonesia era reformasi ini merupakan *regional role model*. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar telah memberikan contoh praktek demokrasi politik bagi negara di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Namun, *The Economist* juga mencatat adanya kesulitan besar, yaitu bagaimana demokrasi pemilu dilaksanakan. Meski sudah ada pengalaman sebelumnya (pemilu 1992 dan 2004), teknik penyelenggaraan pemilu selalu menghadapi sejumlah kesulitan serius yang diantaranya adalah sistem pemilu yang kompleks dan berubah-ubah serta pengaturan logistik pemilu yang tak mudah, mengingat Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 240 juta penduduk. Dalam perspektif *The Economist*, pemilu di Indonesia adalah sesuatu yang amat beresiko, akrobatik, tetapi harus dilalui. Resiko demokrasi pluralis harus ditanggung Indonesia yang memang plural ini. Tampaknya kekhawatiran majalah *The Economist* terbukti setelah pemilu legislatif tanggal 9 April 2009 kemarin. Bangsa yang dalam pemilu sebelumnya menjadi *role model* bagi pelaksanaan demokrasi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh dunia kini menghadapi masalah serius bagi legitimasi dari hasil pemilu. Suara rakyat yang merupakan suatu faktor terpenting dalam demokrasi menjadi lemah. Lemahnya legitimasi disebabkan antara lain oleh banyaknya warga negara yang terpaksa kehilangan hak pilih karena persoalan administrasi. Hal ini diperparah lagi dengan tingginya laporan pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu. Tingginya angka pelanggaran ini sangat dimungkinkan akibat dari tingkat bentuk konflik yang tinggi.

Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, atau sepuluh tahun setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, dan lima tahun setelah UUDS 1950 membangun sebuah demokrasi perwakilan liberal dengan sistem parlementer sebagai bentuk pemerintahan. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, salah satu program yang dilancarkan oleh para bapak bangsa ialah penyelenggaraan pemilu. Namun, pemilu belum mungkin dilaksanakan selama bertahun-tahun, karena masih berlangsung perang kemerdekaan melawan tentara kolonial Belanda.

Pemilu untuk memilih para anggota majelis konstitusional (Konstituante) dianggap sebagai jawaban bagi instabilitas politik. Akhirnya, UU Pemilu 1953 memberi jalan pertama ke arah penyelenggaraan pemilu legislatif yang pertama pada bulan September 1955. UU ini membangun landasan sistem perwakilan proporsional dalam konstituante beranggotakan banyak. Meskipun proses pemilunya berlangsung adil dan demokratis, hasilnya mengecewakan mereka yang berharap bahwa pemilu akan meningkatkan stabilitas demokrasi parlementer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Pemilu yang baru bagi DPR menerapkan perwakilan proporsional di 27 wilayah pemilihan dalam sistem MMC (*multi-member constituency*), yang bervariasi dari empat hingga 82 kursi per konstituensi. Wilayah pemilihan ini identik dengan propinsi. Para calon anggota legislatif (caleg) dinominasikan oleh partai politik. UU Pemilu juga menerapkan sistem pemilu proporsional. Partai politik memiliki hak untuk mengajukan daftar sesuai dengan distrik pemilihannya. Pemilih memilih partai politik, dan tidak secara khusus memilih nama caleg tertentu.

Pemilu legislatif di bawah sistem baru ini diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004. pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai-partai itu terdiri dari lima partai peserta pemilu 1999 yang memenuhi syarat *electoral threshold* sebesar 5 persen, ditambah sebagian parpol peserta pemilu 1999 yang tidak mencapai *electoral threshold* tetapi berhasil memenuhi persyaratan lain untuk ikut pemilu legislatif 2004. partai demikian harus mengubah namanya dari nama lama yang digunakan dalam pemilu 1999.

Pemilu legislatif 2004 ini untuk memilih sekaligus wakil-wakil rakyat di empat lembaga, yaitu DPR dan DPD (Pusat), DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sistem dan berbagai perangkat serta proses pemilu legislatif 2004 berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Partai politik mencantumkan calon-calin mereka untuk DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, sementara calon anggota DPD harus non-afiliasi partai politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem daftar terbuka membuka ruang partisipasi politik yang lebih baik, dalam pengertian kualitas atau derajat keterwakilan, sekalipun tidak dalam pengertian kuantitas (jumlah suara). Sistem ini juga membuka ruang kompetisi bertingkatbagi para calon. Surat suara dari pemilih yang memberikan suaranya hanya kepada nama calon dan tidak memilih partainya dianggap tidak sah. Sebaliknya, suara yang hanya diberikan kepada partai, dianggap sah. Perolehan suara yang dikumpulkan dari pilihan terhadap partai politik secara teoretik merupakan perolehan suara bagi calon berdasarkan nomor urut mereka.

Parpol yang dalam pemilu legislatif 2004 berhasil meraih 3 persen kursi atau 5 persen total suara sah yang dihitung secara nasional berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk bertarung dalam pemilu presiden. Namun, partai-partai yang perolehan suaranya tidak melampaui *presidential threshold* ini masih memiliki kesempatan untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres jika melakukan penggabungan kursi atau perolehan suaranya dengan partai lain, hingga memenuhi ketentuan minimal.[11]

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali diturunkan pada 15 Januari 2009. Namun penurunan harga BBM itu tetap saja dinilai berbau politis. Bahkan pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menuding pemerintahan SBY-JK membohongi rakyat.

---

[11] Friedrich Ebert Stiftung, 2002, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Terjemahan oleh Hermawan Sulistyo dkk. (Jakarta : Pensil-324, 2003), hal. 101-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut pemerintah cukup lihai menguasai psikologis rakyat. Rakyat terlalu mudah percaya dan terlalu banyak berbaik sangka. Padahal sudah kewajiban pemerintah menurunkan harga BBM, seperti kebijakan menaikkan tarifnya dulu. Amien Rais mengatakan, hendaknya rakyat jangan terbuai dengan angin surga pemerintah, karena sudah kewajiban pemerintah menurunkan tarif BBM. Kalau tidak menurunkan, malah pemerintah mempecundangi dan membodohi rakyat. "ya pelan-pelan itu diturunkan. Nanti pas menjelang pemilu semakin diturunkan lagi. Dan ini dijadikan bahan kampanye. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik," ujar mantan Ketua MPR itu. Seharusnya pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja, bukan menurunkan harga BBM. Dengan menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran dan kemiskinan bisa separuhnya berkurang.

Boni Hargen menilai, penurunan BBM ini hanya untuk menutupi kinerja pemerintah yang gagal di bidang ekonomi. Soal penurunan BBM, SBY sebenarnya tidak bekerja apa-apa, namun dia pintar memanfaatkan momen penurunan harga minyak dunia. Menurut dia, ini upaya membohongi rakyat. Maswadi Rauf, mengakui kebijakan pemerintahan SBY menurunkan harga BBM bersubsidi sekaligus memberikan keuntungan politik bagi SBY dalam menghadapi Pilpres 2009. Itulah keuntungan *incumbent* yang tidak dimiliki kandidat lain. SBY tak perlu banyak keluar biaya untuk membangun pencitraan atau popularitas. Dia cukup dengan memperbaiki kebijakan yang berdampak pada kepentingan rakyat banyak popularitas akan datang dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendirinya. Namun dia mengingatkan, kebijakan menurunkan harga BBM bersubsidi (premium dan solar) itu harus berdampak positif bagi perbaikan ekonomi bangsa, bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan politik saja, juga harus berdampak terhadap ekonomi rakyat kecil.

Pemerintah kembali memutuskan penurunan harga BBM jenis premium dan solar yang mulai berlaku 15 Januari 2009. harga premium turun Rp. 500 (10 persen) dari semula Rp. 5.000 menjadi Rp. 4.500 per liter. Harga solar turun Rp. 300 (6,25 persen) dari semula Rp. 4.800 menjadi Rp. 4.500 per liter.

Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, juga menilai kebijakan penurunan harga BBM menguntungkan politik SBY. Penurunan harga BBM harus diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM dan penurunan biaya transportasi yang akan berimbas pada penurunan harga sembilan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Boni Hargen memprediksi, setelah pemilu legislatif April 2009, SBY akan menurunkan lagi harga BBM. Mungkin menjadi Rp. 4000. Cara ini dilakukan untuk mencari dukungan sehingga rakyat memilih SBY. Namun, mendongkrak popularitas SBY lewat harga BBM tidak akan berhasil, karena rakyat sekarang sudah cerdas.

Sekretaris Fraksi partai Amanat Nasional (FPAN) DPR, Muhammad Yasin Kara menegaskan, pemerintah jangan menjadikan BBM dan sembako sebagai alat politik untuk memenangkan kursi presiden pada pemilu 2009. Menurut Yasin, langkah yang dilakukan pemerintah jelas-jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermainkan rakyat. Kalau tidak, caranya tentu bukan begitu. "Masak dalam 45 hari pemerintah menurunkan harga BBM sampai tiga kali. Bagaimana cara menghitungnya kalau ini tidak dikatakan mempermainkan rakyat," kata dia. Malah saya khawatir, kata anggota Komisi X DPR tersebut, ini bukan yang terakhir pemerintah menurunkan harga BBM. Hal serupa kemungkinan juga akan dilakukan menjelang pemilihan presiden 2009 sehingga pemerintahan sekarang kembali terpilih untuk masa lima tahun berikutnya. Harusnya, jelas Yasin, subsidi BBM tersebut dipatok sehingga tidak dapat dijadikan alat politik. Dengan dipatoknya harga BBM, bila harga minyak mentah dunia naik, harga BBM dalam negeri otomatis ikut naik dan demikian juga sebaliknya. "Kalau seperti ini, jangan-jangan bila harga minyak mentah dunia naik akibat terjadinya ketegangan di Timur Tengah, pemerintah kembali menurunkan harga BBM dalam negeri. Biar rugi asal popularitas terus naik sehingga terpilih kembali pada pilpres nanti."

Menurut Sutan yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), duet pemerintahan SBY-JK benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Penurunan harga BBM dalam negeri sampai tiga kali dalam 45 hari, kata Sutan, mengikuti penurunan harga minyak mentah dunia. "kan harga minyak mentah dunia itu tidak langsung turun seperti saat ini. Penurunannya kan bertahap. Jadi, pemerintah menurunkan BBM dalam negeri juga secara bertahap," jelas dia. Kata Sutan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan tidak mungkin harga BBM dalam negeri ini kembali turun bila harga minyak mentah di pasar dunia juga turun.[12]

Penurunan harga BBM digunakan sebagai alat politik dalam pemilihan umum (pemilihan calon legislatif) tahun 2009 menurut pendapat masyarakat di Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ada yang berpendapat setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai macam alasan yaitu warga yang memberi pendapat setuju karena turunnya harga BBM itu hanya sebagai trik politik sesaat saja yang dilakukan oleh kaum elit politik yang tujuannya hanya untuk mencari simpati rakyat. Apabila mereka terpilih menjadi pemimpin maka mereka akan menaikkan harga BBM lagi. Itulah cara satu-satunya untuk mempengaruhi warga supaya calon legislatif dipilih oleh rakyat. Ada juga yang memberi pendapat tidak setuju karena harga minyak dunia turun maka harga minyak di seluruh dunia juga ikut turun, jadi di Indonesia juga mengikuti harga minyak dunia sehingga harga BBM diturunkan. Pemilu calon legislatif tahun 2009 di Indonesia kebetulan saja bersamaan dengan turunnya harga minyak dunia, jadi hal itu bukan diartikan sebagai alat politik. Hanya orang awam yang kurang pengetahuannya mengenai politik saja yang mengatakan bahwa turunnya harga BBM digunakan sebagai alat politik. Warga yang memberikan pendapat setuju mengatakan bahwa turunnya harga BBM sebagai alat politik dalam pemilu legislatif 2009 itu benar karena bisa saja masyarakat terpengaruh oleh tayangan iklan di TV bahwa partai Demokrat mencalonkan

[12] Malinc, *"Penurunan Harga BBM tutupi kegagalan SBY"*, *Harian Terbit* (http://matarakyat.blogspot.com/2009/01/penurunan-harga-bbm-tutupi-kegagalan.html, diakses 23 April 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SBY sebagai presiden kembali dan dalam masa pemerintahannya beliau telah menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali. Iklan tersebut berarti mempengaruhi dan mencari simpati rakyat supaya SBY terpilih kembali menjadi presiden RI. Ada juga tanggapan lain yaitu selama pemerintahan SBY beliau hanya menunjukkan kewibawaannya saja seperti para pelaku KKN dapat diatasi dengan dibantu oleh anggota KPK dan para pelaku teroris juga dapat diatasi dengan adil mereka dieksekusi mati. Tetapi masalah perekonomian tidak bisa diatasinya bahkan dia menaikkan harga BBM dan sembako kemudian menurunkan BBM lagi sebanyak tiga kali.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan kajian lebih mendalam lagi tentang pandangan masyarakat terhadap penurunan harga BBM sebagai alat politik dalam pemilihan umum (pemilihan calon legislatif) tahun 2009 di Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penurunan harga bahan bakar minyak sebagai alat politik dalam pemilihan umum (pemilihan calon legislatif) tahun 2009 di Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat terhadap penurunan harga bahan bakar minyak sebagai alat politik dalam pemilihan umum (pemilihan calon legislatif) tahun 2009 di Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata kepada pihak akademis yaitu sebagai kontribusi pemikiran terhadap lembaga akademis IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya Fakultas Dakwah program studi Sosiologi, serta masyarakat luas termasuk obyek kajian yang diteliti.
2. Bagi penulis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu sosial serta untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan strata satu (S1).
3. Bagi warga masyarakat yang diteliti dengan adanya penurunan harga BBM biaya pengeluaran transport maupun kebutuhan ekonomi lain bisa menjadi hemat.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang judul skripsi ini serta untuk membatasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah penelitian, maka definisi konsep menjadi penting untuk diajukan. Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang akan didefinisikan yaitu :

1) Pandangan masyarakat yaitu cara pandang kelompok warga setempat dalam memberi pendapat atau menilai sesuatu. Masyarakat disini dapat diartikan sebagai kelompok orang yang memiliki persamaan dalam hal ini, yaitu dalam arti kata bahwa mereka berhubungan erat satu sama lain. S.F. Nadel memberi definisi tentang istilah masyarakat yaitu satu kumpulan manusia yang terikat dalam suatu kesatuan yaitu bertindak secara terintegrasi dan tetap, dan bersifat agak kekal dan stabil.[13]
2) Penurunan harga menurut kamus lengkap ekonomi dan secara etimologi memiliki arti yaitu proses, cara, perbuatan menurun, menuruni, atau menurunkan, penyusutan, pengurangan harga dan sebagainya. Bentuk pembuktian bahwa sesuatu diturunkan secara logis dari lainnya tanpa memperhatikan artinya.[14] Harga yaitu nilai uang dari satu unit barang, jasa, aktiva atau masukan faktor. Dalam beberapa pasar, maka harga seiuruhnya akan ditetapkan oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Sebaliknya, dalam pasar-pasar yang lain misalnya pasar monopoli, para pemasok yang kuat dianggap mempunyai keleluasaan dalam menetapkan harga. Dalam keadaan-keadaan tertentu, harga-harga mungkin berada pada pengendalian harga pemerintah melalui kebijakan

---

[13] Duncan Mitchel, *Sosiologi Suatu Analisa Sistem Sosial* (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 46-47.

[14] Y. Istiyono Wahyu & Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Karisma Publishing Group, 2006), hal. 620.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga dan pendapatan.[15] Jadi penurunan harga dapat diartikan sebagai proses atau cara penyusutan nilai berupa barang, jasa, dan aktiva dalam keadaan-keadaan tertentu pada pengendalian dan kebijakan harga dari pemerintah yang sudah ditetapkan.

3) BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.[16] Dengan semakin berkembangnya teknologi kendaraan bermotor, jenis bahan bakar minyak pun semakin beragam. Minyak mentah hasil penambangan didestilasi menjadi beberapa fraksi bahan bakar seperti minyak tanah, solar, dan bensin. Bahan bakar ini berisi rantai hidrokarbon. Ketika dibakar dengan oksigen, rantai hidrokarbon ini menghasilkan energi dan karbondioksida. Energi ini dipakai untuk menggerakkan mesin untuk berbagai keperluan, mulai kendaraan bermotor, industri, sampai urusan dapur.

4) Alat yaitu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, yang dipakai untuk mencapai maksud, orang yang dipakai untuk mencapai suatu maksud : mereka itu hanya dipakai sebagai untuk melemahkan semangat rakyat.[17]

5) Politik adalah suatu bidang studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan-permasalahan bersama dengan manusia yang lain. Dalam hal ini ilmu politik mencakup studi mengenai permasalahan

---

[15] Christopher Pass, Bryan Lowes L.&L.Davies, 1994, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Terjemahan oleh Tumpal Rumapea &Posman Haloho (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2000), hal. 499.

[16] Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (http://www.bpmigas.com/uu-migas.asp, diakses 23 April 2009)

[17] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, mengenai perlengkapan yang dikembangkan manusia untuk memecahkan permasalahan tersebut, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manusia, dan terutama mengenai ide yang mempengaruhi manusia untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Dengan demikian ilmu politik tidak sama dengan studi mengenai pemerintah, melainkan mengenai fungsi pemerintah dalam masyarakat. Menurut anggapan umum, titik sentral studi politik adalah kekuasaan dalam konteks masyarakat. Yang disebut politik itu menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk kegiatan partai politik dan kegiatan individu demi kepentingan bersama. Untuk menjelaskan pengertian politik tampak bahwa perhatian sentral dari politik adalah penyelesaian konflik antar manusia, proses pembuatan keputusan-keputusan ataupun pengembangan kebijakan-kebijakan, secara otoritas yang mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu, atau pelaksanaan kekuasaan dan pengaruhnya di dalam masyarakat.[18]

6) Pemilihan Umum yaitu memilih sebagian rakyat untuk menjadi pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan yang seyogianya merupakan hak semua rakyat yang kelak diperintah oleh orang-orang yang terpilih itu. Proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya menjadi pemilihan. Dalam pemilihan itu semua rakyat harus ikut, tanpa dibeda-bedakan, maka dipakailah sebutan pemilihan umum disingkat

[18] Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001), hal. 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu.[19] Pemilu adalah sarana pergantian atau kelanjutan suatu pemerintahan. Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidential, pemilu diartikan untuk memilih presiden. Sedangkan di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, pemilu dimaksudkan untuk mengantar wakil-wakil partai tertentu sebanyak mungkin ke parlemen, agar dapat membentuk pemerintah.[20]

7) Calon legislatif diartikan satu persatu yaitu calon menurut kamus praktis Bahasa Indonesia memiliki arti akan menjadi.[21] Legislatif yaitu yang berhubungan dengan perundang-undangan, kekuasaan untuk membuat undang-undang, suatu badan pembuat undang-undang (DPR).[22] Jadi calon legislatif adalah seseorang yang akan dicalonkan menjadi anggota DPR Pusat, DPRD Propinsi, DPRD Kota dan DPD yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu legislatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman secara utuh mengenai penelitian ini, peneliti membagi ke dalam lima bab yang saling berhubungan dan berurutan secara sistematis dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

---

[19] Parulian Donald, *Menggugat Pemilu* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 4.
[20] Gouzali Saydam, *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 9.
[21] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), hal. 22.
[22] H. Zainul Bahri S.H., *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik* (Bandung : Angkasa, 1996), hal. 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab pertama ini antara lain meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORETIK

Pada bab kedua ini antara lain menguraikan kajian pustaka, kajian teoretik dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini membahas tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Subyek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Tahap-Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab keempat ini antara lain membahas tentang setting penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab lima atau bab terakhir yang merupakan bagian penutup antara lain berisi kesimpulan dari hasil kajian terhadap permasalahan yang ada, dan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi kajian penelitian-penelitian lain lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id